

**PARTISIPASI MASYARAKAT JEPANG DALAM
PELAKSANAAN PENDIDIKAN WAJIB BELAJAR
DI JEPANG**

Skripsi Sarjana ini disusun sebagai
salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Sastra

Oleh

EKA PURWANINGSIH

NIM : 00110131



**JURUSAN SASTRA JEPANG FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS DARMA PERSADA
JAKARTA
2004**

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan untuk melengkapi persyaratan mencapai gelar Sarjana Sastra.

Telah disahkan pada

Hari : Senin

Tanggal : 16 Agustus 2004



Ketua Program Studi

Bahasa dan Sastra Jepang

(Dra. Yuliasih Ibrahim)

Dekan Fakultas Sastra



FAKULTAS SASTR

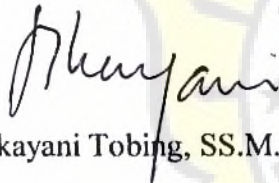
(Dra. Inny C. Haryono, MA)

Skripsi Sarjana yang berjudul :

**PARTISIPASI MASYARAKAT JEPANG DALAM PELAKSANAAN
PENDIDIKAN WAJIB BELAJAR DI JEPANG**

Telah diuji dan diterima dengan baik (lulus) pada tanggal 16 bulan Agustus tahun 2004 dihadapan panitia ujian skripsi Sarjana Fakultas Sastra.

Pembimbing/Penguji I



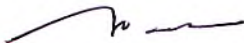
(DR. Ekayani Tobing, SS.M.Hum)

Ketua Panitia



(Dra. Tini Priantini)

Pembimbing/Penguji II



(Nani Dewi Sunengsih, SS)

Ketua Jurusan



(Dra. Yufiasih Ibrahim)

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah S.W.T atas segala rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi persyaratan akademis untuk mencapai jenjang Sarjana Sastra (S1) pada Program Studi Bahasa dan Sastra Jepang, Fakultas Sastra Universitas Darma Persada. Adapun judul dari skripsi ini adalah **Partisipasi Masyarakat Jepang dalam Pelaksanaan Wajib Belajar di Jepang.**

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini tidak luput dari dukungan-dukungan yang diberikan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih atas segala bantuan serta dukungannya kepada yang terhormat :

1. Ibu Dra. Inny C. Haryono, MA, selaku Dekan Fakultas Sastra.
2. Ibu Dra. Yuliasih Ibrahim, selaku Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra Jepang.
3. Bapak Irwan Djamalludin PhD, selaku Penasehat Akademik.
4. Ibu Dra. Tini Priantini, selaku Ketua Sidang.
5. Ibu DR. Ekayani TobingSS, MHum, selaku Pembimbing I yang dengan penuh kesabaran membimbing dan memberikan pengarahan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini hingga dapat terselesaikan.
6. Ibu Nani Dewi Sunengsih SS, selaku Pembimbing II yang penuh ketelatenan dan ketelitiannya membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini.

7. Bapak/Ibu Dosen pada Program Studi Bahasa dan Sastra Jepang yang telah membimbing penulis sejak awal perkuliahan hingga tercapainya penulisan skripsi ini.
8. Kedua Orangtuaku dan kedua adikku tercinta yang dengan ketulusan hati dan do'anya selalu mendukung penulis baik moral maupun materi hingga penulisan skripsi ini terselesaikan.
9. Mba' Sur, Pak Basri dan Ade Sufi', atas perhatiannya dan dukungannya penulis mengucapkan terimakasih.
10. Teman-teman FSJ Angkatan 2000, Retty, PV, Ceu2, Yusi, Apank, Winda, Hany, Lonita, Rita'80, Tria, Tyo dan teman-teman lainnya yang ada di kampus.
11. Teman-teman lainnya, Kak Devi, Kak Nanin, Nyoman, Seto, Imay, Ivan, Omen, Amos, Ian terimakasih untuk keceriannya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan saran-saran maupun kritikan yang memberikan dorongan bagi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan diakhir kata penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya jika terjadi kesalahan dalam penulisan skripsi ini.

Jakarta, 16 Agustus 2004

Penulis

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan.....	i
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	v
BAB I Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Permasalahan.....	6
1.3 Tujuan Penulisan.....	6
1.4 Ruang Lingkup.....	6
1.5 Metode Penulisan.....	7
1.6 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II Penetapan Wajib Belajar Di Jepang	
2.1 Sejarah Perkembangan Pendidikan Wajib Belajar.....	9
2.2 Motivasi dan Pandangan ke Depan Bangsa Jepang.....	16
2.3 Sekolah dan Guru di Jepang.....	20
BAB III Partisipasi Masyarakat Pada Pendidikan Wajib Belajar	
3.1 Pandangan Masyarakat Terhadap Wajib Belajar.....	25
3.2 Manfaat Wajib Belajar bagi Masa Depan Masyarakat Jepang.....	
3.2.1 Kesempatan Yang Sama Dalam Mendapatkan Pendidikan...33	
3.2.2 Orientasi Terhadap Individualisme.....	34

3.2.3 Masyarakat yang Berkualitas.....	36
3.3 Solusi yang Dilakukan Masyarakat Jepang Dalam Pelaksanaan Wajib Belajar.....	38
BAB IV Kesimpulan.....	43
Glosari	
Daftar Pustaka	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam sejarah modern, Jepang dikenal sebagai suatu bangsa yang cepat menyesuaikan diri dan juga dikenal dengan kesuksesannya menyamai negara-negara di Barat. Kesuksesannya yang pertama, terlihat pada Restorasi Meiji (1868) yaitu Jepang bias mengadakan pembaharuan pada sistem negaranya yang bersifat feodal menjadi bangsa yang modern dan pertumbuhannya mengikuti pertumbuhan bangsa Barat.¹ Seperti halnya bangsa lain yang memiliki sejarah sendiri dalam perkembangan negaranya, Jepang pun mengalaminya. Karena seperti kita ketahui bahwa di dalam sejarah suatu bangsa pasti tersimpan nilai-nilai suatu budaya bangsa yang merupakan tolak ukur dalam memulai kehidupan bangsanya yang lebih baik lagi. Dari adanya sejarah modern ini telah membuktikan kepada dunia bahwa walaupun Jepang banyak mengalami kehancuran akibat perang, Jepang dengan semangatnya yang besar terus berusaha untuk dapat sejajar dengan bangsa-bangsa Barat yaitu dengan mengikuti perkembangan-perkembangan yang dialami bangsa Barat. Kemudian setelah Perang Dunia Kedua, pengaruh-pengaruh dari Barat secara serempak masuk ke Jepang.

¹ Leonard James Schoppa, "Education reform in Japan : a case of immobilist politics", 1962, hal 1

Walaupun demikian, ternyata Jepang bias melakukan penyesuaian secara efisien untuk mencapai kesamaan dalam bidang perekonomian dengan Amerika Serikat atau dengan bangsa-bangsa Barat lainnya. Dari pembaharuan-pembaharuan yang dilakukan Jepang dalam sistem pemerintahan, ternyata sistem pendidikan pun mengalami perubahan dan menjadikan pendidikan itu sebagai unsur penting dalam pembangunan Jepang. Semua ini tidak lepas dari usaha-usaha yang dilakukan oleh para pemimpin dalam Periode Meiji, untuk mendirikan dan memperluas pendidikan wajib bagi rakyat Jepang. Tujuan diadakannya pendidikan wajib belajar ini adalah agar Jepang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas untuk dapat mengejar ketinggalan dari bangsa-bangsa Barat. Dari adanya usaha-usaha yang dilakukan para pemimpin Jepang telah membuktikan bahwa mereka sangat mendukung pelaksanaan pendidikan wajib belajar yang dipercayai sebagai langkah awal menuju kesuksesan Jepang dalam menyamai kedudukan dengan bangsa-bangsa Barat. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, mengenai usaha-usaha yang telah dilakukan para pemimpin di zaman Meiji sebagai wujud usaha mereka, maka pada bulan Oktober 1868 Jepang mendirikan suatu lembaga yang bertugas mengawasi dan mengatur segala sesuatu yang akan diperlukan dari sebuah sekolah. Selain itu maksud lain didirikannya lembaga ini memang dipersiapkan khusus untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan dihadapi dari adanya suatu rencana perubahan sistem pendidikan pada masa Tokugawa menjadi sistem pendidikan baru yang disebut dengan *Gakusei*

(Sistem pendidikan baru Jepang yang mencontoh sistem pendidikan Perancis).² Usaha-usaha ini telah membuktikan bahwa Jepang memang benar-benar serius dalam pelaksanaan pendidikannya. Oleh karena itu pada tahun 1872, sistem pendidikan *Gakusei* ini ditetapkan untuk pertama kalinya dan sistem pendidikan ini diperuntukan bagi anak laki-laki maupun perempuan yang berumur dari 6 sampai dengan 14 tahun yang diwajibkan mengikuti pendidikan wajib belajar selama 4 tahun. Tetapi, pada tahun 1872 sistem pendidikan yang sudah berjalan ini ternyata dianggap terlalu ambisius dan menyebabkan banyak kesulitan dalam menjalankan sistem pendidikan wajib belajarnya. Semua ini dikarenakan kurangnya persiapan pemerintah dalam menghadapi apa yang akan terjadi dari adanya perluasan sistem pendidikan itu sendiri, yang ternyata memerlukan biaya yang sangat besar dan tinggi, baik itu mengenai biaya sekolah dan biaya untuk buku sekolah.

Dengan demikian pemerintah memberikan sebagian besar beban pendidikan kepada masyarakat agar sistem pendidikan tersebut dapat berjalan dengan semestinya. Namun, hal ini mendapat pertentangan dari masyarakat khususnya masyarakat pedesaan yang merasa keberatan dengan adanya pendidikan wajib belajar yang ternyata membutuhkan biaya yang cukup besar. Kehadiran pendidikan wajib belajar ini selain mendapatkan pertentangan dari masyarakat Jepang ternyata menyebabkan semakin luasnya pelanggaran-pelanggaran yang

² Herbert Passin, "Society and Education in Japan", Columbia University Press, New York, 1965, hal 6979.

ditujukan untuk menghentikan pendidikan wajib belajar ini, yang menyebabkan semakin menurunnya minat anak-anak yang mengikuti pendidikan wajib belajar. Tapi kesulitan-kesulitan tersebut tidak berlangsung lama.

Pada awal tahun 1900-an, pendidikan wajib belajar 4 tahun dibebaskan dari pembayaran karena biaya-biaya yang diperlukan dalam pembangunan dan pemeliharaan sekolah telah diserahkan kepada dewan yang ditunjuk dari setiap desa maupun kota. Selain itu, pendidikan wajib belajar 4 tahun semakin meluas ke seluruh wilayah Jepang. Pada tahun 1907, pendidikan wajib belajar diubah menjadi 6 tahun yang hanya diberikan pada *tingkat sekolah dasar*.

Kemudian pada tahun 1974 Jepang yang berada di bawah pengaruh pendudukan Amerika Serikat, menyusun kembali sistem pendidikannya yang mengikuti model sistem pendidikan di Amerika Serikat yang menjadi 6-3-3-4 tahun, yaitu 6 tahun pada pendidikan dasar (Sekolah Dasar), 3 tahun pada pendidikan menengah (Sekolah Menengah Pertama), 3 tahun pada pendidikan menengah atas (Sekolah Menengah Atas), dan 4 tahun pada perguruan tinggi. Bersamaan dengan perubahan sistem pendidikan ini, pendidikan wajib belajar pun ditingkatkan lagi menjadi 9 tahun.³

Untuk dapat menyelenggarakan sistem pendidikan tersebut, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan lembaga-lembaga swasta turut berperan serta. Namun yang memiliki peran yang sangat besar adalah pemerintah daerah dan swasta, sedangkan pemerintah pusat hanya turut memberikan subsidi keuangan kepada

³ Ibid, hal 108.

pemerintah daerah, untuk menyelenggarakan pendidikan wajib belajar, seperti pembiayaan semua buku pelajaran, separuh gaji guru, separuh sampai dua pertiga biaya pembangunan sekolah, separuh biaya alat pelajaran, separuh biaya untuk pendidikan jasmani, pendidikan sosial dan lain-lainnya.

Berhasilnya sistem pendidikan Jepang ini dikarenakan dengan adanya persamaan dan pemerataan pendidikan dikalangan masyarakat. Administrasi sekolah di Jepang memang berada di tangan yuridiksi kota setempat, namun standar pendidikan untuk semua sekolah di seluruh negeri ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pengawasan terpusat inilah yang telah menghasilkan suatu sistem pendidikan, kurikulum, bahan pelajaran yang diajarkan, yang dibuat benar-benar seragam.⁴

Dengan demikian kita dapat melihat betapa besar peranan pemerintah pusat dalam perkembangan pendidikan yang memang ditujukan untuk kemajuan bangsa Jepang itu sendiri. Selain memperhatikan fasilitas-fasilitas yang diperlukan dalam pendidikan, pemerintah juga sangat memperhatikan perkembangan anak-anak Jepang yang merupakan satu-satunya penerus bangsa yang perlu diperhatikan dan dilindungi karena siapa lagi yang akan meneruskan kesuksesan Jepang yang telah mereka capai sejak dulu kala.

Disamping pemerintah, para orangtua dan masyarakat Jepang juga mendukung pentingnya dalam memperhatikan perkembangan anak-anak Jepang

⁴ Sayidiman Suryohadiprojo, *Manusia dan Masyarakat Jepang dalam Perjuangan Hidup*, Jakarta 1982, hal 212-213.

baik dalam lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Ini membuktikan bahwa begitu besarnya perhatian dan partisipasi masyarakat Jepang dalam pelaksanaan *Wajib Belajar* yang merupakan langkah awal mereka untuk memperoleh pendidikan dasar dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

1.2 Permasalahan

Dalam penulisan skripsi ini penulis mencoba membahas mengenai bagaimana cara pandang masyarakat Jepang dalam menjalankan dan memajukan pendidikan wajib belajar di Jepang.

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengkaji dan memahami seberapa besar partisipasi masyarakat Jepang yang terdiri dari anak-anak Jepang maupun para orangtua Jepang dan pemerintah dalam pelaksanaan *Wajib Belajar*.

1.4 Ruang Lingkup

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mencoba membatasi masalah mengenai partisipasi masyarakat Jepang dalam pelaksanaan *Wajib Belajar* yang hasilnya tampak pada kenaikan jumlah anak Jepang yang belajar dewasa ini. Selain itu juga penulis ingin membatasi masalah pendidikan *Wajib Belajar* hanya pada tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

1.5 Metode Penulisan

Sebagai metode penulisan, penulis menggunakan metode penulisan kepustakaan. Data-data dalam penulisan skripsi ini merupakan hasil pendeskripsian dari buku-buku yang dibaca dan diperoleh dari Perpustakaan Japan Foundation, Perpustakaan Universitas Darma Persada dan Perpustakaan CSIS.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini memiliki sistematika penulisan yang terdiri dari empat bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis mencoba menerangkan hal-hal yang menjadi :

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Permasalahan
- 1.3 Tujuan Penulisan
- 1.4 Ruang Lingkup
- 1.5 Metode Penulisan
- 1.6 Sistematika Penulisan

BAB II PENETAPAN WAJIB BELAJAR DI JEPANG

- 2.1 Sejarah Perkembangan Pendidikan Wajib Belajar
- 2.2 Motivasi dan Pandangan Kedepan Bangsa Jepang
- 2.3 Sekolah dan Guru di Jepang

BAB III PARTISIPASI MASYARAKAT PADA WAJIB BELAJAR

- 3.1 Pandangan Masyarakat Terhadap Wajib Belajar
- 3.2 Manfaat Wajib Belajar Bagi Masa Depan Masyarakat Jepang
 - 3.2.1 Kesempatan Yang Sama dalam Mendapatkan Pendidikan
 - 3.2.2 Orientasi Terhadap Individualisme
 - 3.2.3 Masyarakat Yang Berkualitas
- 3.3 Solusi yang Dilakukan Masyarakat dalam Pelaksanaan Wajib Belajar di Jepang

BAB IV KESIMPULAN

Pada bab ini penulis mencoba menyimpulkan isi dari skripsi ini.